

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM SETELAH PEMBERLAKUAN ROAD MAP MENUJU BUMN BERSIH

Nanda Adib Al Amin
Smatagaseven@yahoo.com
Nur Handayani
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to provide empirical evidence of differences of financial performance of the company, before and after the implementation of Circular Letter of state ministries of State Owned Enterprises No. 05/MBU/2013 about the Roadmap towards clean State Owned Enterprises. The financial performance is measured by using profitability ratio, liquidity ratio, and leverage ratio. Meanwhile, Good Corporate Governance (GCG) is carried out by using the Circular Letter of state ministries of State Owned Enterprises No. 05/MBU/2013. The results showed the company's financial performance before and after the enactment of Circular of the Ministry of State-Owned Enterprises No. 05 / M BU / 2013 About Road Map Towards a Clean State Owned Enterprises shown to have a significant difference. Meanwhile, the results of hypothesis testing Return On Investment and Net Profit Margin resulted in a significant difference, while the Current Ratio, Quick Ratio, Debt Ratio, and Debt To Equity ratio shows the results no significant difference before and after the application of Circular of the Ministry of State-Owned Enterprises No. 05 / MBU / 2013 About Road Map Towards clean State Owned Enterprises. Significant differences Return On Investment and Net Profit Margin before and after the application of the Circular of the State Ministry of State-Owned Enterprises No. 05 / MBU / 2013 due to changes in the company's working system to meet the pillars upholding Good Corporate Governance contained in the Circular. The absence of a significant difference to the Current Ratio, Quick Ratio, Debt ratio and Debt To Equity Ratio is due to the company in establishing the pillars of good corporate governance in the form of the company's work system change impact rising value of the company (Corporate Asset) due to the emergence of corporate debt

Keywords: *Good Corporate Governance, Circular Letter of Ministry State of BUMN No. 05/MBU/2013, Financial Performance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris perbedaan Kinerja Keuangan perusahaan, Sebelum dan Setelah implementasi Surat Edaran Kementerian Negara BUMN Nomor 05/MBU/2013 Tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih. Kinerja Keuangan di ukur dengan Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas, Rasio *Leverage*. Sedangkan *Good Corporate Governance* (GCG) digunakan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja keuangan perusahaan sebelum dan setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/M BU/2013 Tentang *Road Map* Menuju BUMN Bersih terbukti memiliki perbedaan signifikan. Sementara itu, hasil pengujian hipotesis *Return On Investment* dan *Net Profit Margin* menghasilkan perbedaan yang signifikan, sedangkan *Current Ratio*, *Quick Ratio*, *Debt Ratio*, dan *Debt To Equity ratio* menunjukkan hasil tidak terdapat perbedaan signifikan sebelum dan setelah pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013 Tentang *Road Map* Menuju BUMN Bersih. Perbedaan signifikan *Return On Investment* dan *Net Profit Margin* sebelum dan setelah penerapan SE KEMNEG BUMN Nomor 05/MBU/2013 disebabkan terjadinya perubahan sistem kerja dalam perusahaan guna memenuhi penegakan pilar – pilar GCG yang terdapat dalam Surat Edaran. Tidak terjadinya perbedaan signifikan terhadap *Current Ratio*, *Quick ratio*, *Debt ratio* dan *Debt To Equity Ratio*

disebabkan perusahaan dalam menegakkan pilar – pilar GCG dalam wujud pergantian sistem kerja perusahaan memberikan dampak naiknya nilai perusahaan (Aset Perusahaan) yang disebabkan karena timbulnya hutang perusahaan.

Kata kunci: Good Corporate Governance, Surat Edaran Kementerian Negara BUMN Nomor 05/MBU/2013, Kinerja keuangan.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara atau biasa disingkat BUMN adalah suatu unit usaha yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara dimana kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. BUMN biasanya populer di negara berkembang, termasuk di Indonesia. BUMN bergerak pada bidang usaha yang melibatkan hajat hidup orang banyak dan juga sektor-sektor penting lainnya. Tidak seperti badan usaha swasta pada umumnya, BUMN tidak memiliki orientasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tetapi lebih kepada untuk mensejahterakan masyarakat. BUMN juga dapat menjadi stabilisator perekonomian negara guna menghindari monopoli dari pihak swasta yang pada dasarnya untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin.

Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945. Berdasarkan tujuan pengelolaan BUMN, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik / *good corporate governance* (GCG) secara konsisten merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan BUMN, disamping ketatnya persaingan dengan kompetitor. Penerapan prinsip - prinsip GCG dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku, antara lain, Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance sebagai acuan dalam mengembangkan pengelolaan dan penerapan GCG, dan Surat edaran Menteri Negara BUMN nomor SE-05/MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih.

Surat edaran Menteri Negara BUMN nomor SE-05/MBU/2013 tentang *Roadmap Menuju BUMN Bersih* merupakan penjabaran teknis Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, dan salah satu bentuk regulasi pemerintah dalam mengatur BUMN, Surat Edaran ini merupakan kewajiban kepada seluruh BUMN untuk menegakkan pilar-pilar *Good Corporate Governance* yaitu: *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness* pada tiap jenjang jabatan yang ada dalam BUMN, maksud dan tujuan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut adalah guna meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) baik secara administratif maupun substantif, dan mewujudkan BUMN yang tangguh (profesional dan tahan guncangan/godaan), unggul (mengutamakan Sistem, Mutu, dan inovasi) serta bermartabat (bersih dari segala bentuk penyimpangan dan kecurangan termasuk korupsi). Secara teknis penegakan pilar-pilar *Good Corporate Governance* melalui Surat Edaran Menteri Negara BUMN nomor SE-05/MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih, Kementerian BUMN akan meminta bantuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk secara periodik melakukan penilaian BUMN Bersih melalui survei persepsi terhadap semua pemangku kepentingan (Stakeholders), yang terdiri dari karyawan, pelanggan, rekanan

(pemasok dan kontraktor) serta kalangan masyarakat yang relevan. Surat Edaran Menteri BUMN di berlakukan bagi seluruh BUMN mulai tanggal 30 September 2013.

Dari uraian latar belakang ini, maka dipandang perlu untuk mengadakan suatu penelitian terkait Perbedaan Kinerja Keuangan perusahaan, Sebelum dan Setelah Implementasi Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013 Tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih dimana surat edaran ini merupakan aturan teknis pelaksanaan *Good Corporate Governance* di lingkungan BUMN dan merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Negara BUMN nomor 01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara. Sehingga, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Apakah Terdapat Perbedaan Kinerja Keuangan perusahaan, Sebelum dan Setelah Implementasi Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013 Tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih?.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris perbedaan Kinerja Keuangan perusahaan, Sebelum dan Setelah implementasi Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013 Tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih, selanjutnya dengan ditemukannya perbedaan akan dilakukan analisis dan pengujian statistik, apakah ada beda kinerja keuangan perusahaan Sebelum dan Setelah implementasi Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013 Tentang *Roadmap* Menuju BUMN Bersih .

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

Analisa Laporan Keuangan

Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya dilakukan untuk melihat prospek dan resiko perusahaan. Prospek untuk mengetahui tingkat keuntungan (profitabilitas) sedangkan resiko untuk mengetahui perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan atau tidak. Menurut Harahap (2010) Rasio Keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti), misalnya antara utang dan modal, antara kas dan total aset, antara harga pokok produksi dengan total penjualan. Tujuan dari analisis rasio keuangan adalah membantu manajer dalam memahami apa yang perlu dilakukan perusahaan sehubungan dengan informasi yang berasal keuangan yang sifatnya terbatas. Dengan menggunakan rasio-rasio tertentu manajer akan memperoleh suatu informasi tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan dibidang keuangan.

Manfaat dari analisis rasio keuangan dapat diketahui adanya kelemahan-kelemahan dari tahun-tahun sebelumnya. Manfaat lain adalah dapat memberikan informasi apakah perusahaan dalam aspek keuangan tertentu berada diatas rata-rata, pada rata-rata atau dibawah rata-rata. Apabila diketahui bahwa perusahaan dibawah rata-rata maka pimpinan perusahaan akan mencari faktor-faktor yang menyebabkannya untuk kemudian diambil kebijakan keuangan sehingga dapat meningkatkan rasio keuangan. Apabila perusahaan berada di bawah standar, maka manajemen akan mencari faktor-faktor yang menyebabkannya untuk kemudian diambil kebijakan keuangan untuk dapat menaikkan rasio perusahaannya kembali.

Rasio-Rasio Keuangan.

Rasio *profitabilitas* merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya, dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah *Return on investment* merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. *Return on investment* adalah merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang

tersedia didalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan suatu perusahaan, dan *Net profit margin* rasio mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi *Net profit margin* semakin baik operasi suatu perusahaan.

Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaanperusahaan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Dalam Penelitian ini Rasio Likuiditas yang di gunakan adalah *Current Ratio* Merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dan *Quick Ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio Leverage / Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila sekiranya perusahaan dilikuidasi. Dalam penelitian ini akan diambil 2 (dua) rasio,*Debt Ratio* Rasio ini merupakan perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Sehingga rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva, dan *Debt To Equity Ratio* menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar dan merupakan rasio yang mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai dari hutang.

Hubungan Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-05/MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih dan Good Corporate Governance.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan GCG sebagai seperangkat peraturan atau sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Adapun prinsip-prinsip GCG yang disusun Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006), yaitu: *Transparansi (Transparency)*, *Akuntabilitas (Accountability)*, *Responsibilitas (Responsibility)*, *Independensi (Independency)*, *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*. Perusahaan akan mampu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi dengan segala aktivitas bisnis yang dilakukannya jika telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Diharapkan penerapan prinsip-prinsip GCG dapat membantu terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan tentunya bebas praktik monopoli. Tujuan *Good Corporate Governance* adalah, (1) Melindungi hak serta kepentingan pemegang saham, (2) Melindungi hak serta kepentingan anggota stakeholders non-pemegang saham, (3) Meningkatkan nilai perusahaan serta para pemegang saham, (4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus maupun *Board of Directors* serta manajemen perusahaan, (5) Meningkatkan mutu hubungan antara *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Surat edaran Menteri Negara BUMN nomor SE-05/MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih merupakan penjabaran teknis Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, dan salah satu bentuk regulasi pemerintah dalam mengatur BUMN, Surat Edaran ini merupakan kewajiban kepada seluruh BUMN untuk menegakan pilar-pilar *Good Corporate Governance* yaitu: *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness* pada tiap jenjang jabatan yang ada dalam BUMN, maksud dan tujuan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut adalah guna meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) baik secara administratif maupun substantif, dan mewujudkan BUMN yang tangguh (profesional dan tahan goncangan/godaan), unggul (mengutamakan Sistem, Mutu, dan inovasi) serta bermartabat (bersih dari segala bentuk penyimpangan dan kecurangan termasuk korupsi). Secara teknis

penegakan pilar-pilar *Good Corporate Governance* melalui Surat Edaran Menteri Negara BUMN nomor SE-05/MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih, Kementerian BUMN akan meminta bantuan Badan Pengawas Keuagandan Pembangunan (BPKP) untuk secara periodik melakukan penilaian BUMN Bersih melalui survei persepsi terhadap semua pemangku kepentingan (*Stakeholders*).

Hubungan Surat Edaran Menteri Negara BUMN nomor SE-05/MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih dengan kinerja keuangan BUMN.

Surat edaran Menteri Negara BUMN nomor SE-05/MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih merupakan penjabaran prinsip GCG dimana perusahaan di tuntut untuk menegakan pilar-pilar *Good Corporate Governance* yaitu: *transparency, accountability, responsibility, independency*, dan *fairness* pada tiap jenjang jabatan yang ada dalam BUMN. Dengan adanya pilar-pilar di atas perusahaan mampu untuk bersaing di dunia usaha dan Melindungi hak serta kepentingan pemegang saham, Melindungi hak serta kepentingan anggota stakeholders non-pemegang saham, Meningkatkan nilai perusahaan serta para pemegang saham, Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus maupun *Board of Directors* serta manajemen perusahaan, dan Meningkatkan mutu hubungan antara *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Bhagat dan Brian Bolton (2009) menemukan hubungan positif signifikan antara *independent board* dengan kinerja operasional perusahaan setelah penerapan regulasi *Sarbanes-Oxley Act (SOX)*, sejalan dengan penelitian diatas Ho et.al. (2012) menyatakan tingkat *profitabilitas, share marked, likuiditas, dan struktur modal* perusahaan malaysia meningkat setelah terjadinya perubahan tata kelola perusahaan atau penerapan *good corporate governance*, sementara penurunan terjadi setelah penerapan *good corporate governance* adalah *cash flow* perusahaan.

Beberapa penelitian menemukan bahwa *good corporate governance* tidak mempunyai korelasi maupun asosiasi dengan kinerja keuangan, penelitian Ibrahim et al., (2007) menemukan bahwa tidak ada korelasi antara pengungkapan tata kelola perusahaan dan rasio neraca (*Current ratio, Long-term Liabilities to Total Assets Ratio, Total Debt to Total Assets Ratio, Total Equity to Total Assets Ratio, dan Share Capital to Total Asset Ratio*), Agnesia (2012) juga menemukan penerapan GCG yang dilakukan perbankan ternyata belum efektif hal ini dapat dilihat dari rata-rata kinerja keuangan perbankan sebelum dengan sesudah penerapan GCG adalah sama atau tidak berbeda secara nyata.

Pengembangan Hipotesis

Ho et al, (2012) Perubahan tata kelola perusahaan dengan menerapkan *good corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan rasio keuangan perusahaan malaysia pada range waktu 2001-2006 menunjukkan hasil bahwa tingkat *profitabilitas, share marked, likuiditas, dan struktur modal* perusahaan malaysia meningkat setelah terjadinya perubahan tatakelola perusahaan. Sejalan dengan Ho et al. (2012), Ibadil M. (2013) Pelaksanaan *good corporate governance* yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan, bahwa dana yang diinvestasikan dalam perusahaan yang bersangkutan akan dikelola dengan baik dan kepentingan investor akan aman.

Penjelasan di atas, memberikan pemahaman bahwa *good corporate governance* akan dapat meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan, artinya bahwa tingkat profitabilitas sebelum dan setelah implementasi Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013 Tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih akan berbeda, Sehingga hipotesis penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

- H₁** : Terdapat Perbedaan Signifikant *Return On Investment* (ROI) Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013; dan
- H₂** : Terdapat Perbedaan Signifikant *Net Profit Margin* (NPM) Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013.

Ibrahim *et al.* (2007) dalam penelitiannya menguji antara pengungkapan *Good Corporate Governance* dengan rasio keuangan yang menggunakan data neraca perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 114 perusahaan yang listing di bursa efek malaysia, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara pengungkapan tata kelola perusahaan dan rasio neraca (*Current ratio, Long-term Liabilities to Total Assets Ratio, Total Debt to Total Assets Ratio, Total Equity to Total Assets Ratio, dan Share Capital to Total Asset Ratio*), dan tingkat pengungkapan *good corporate governance* tidak berhubungan dengan lima rasio neraca tersebut, sementara penelitian Ho *et al.* (2012) Perubahan tata kelola perusahaan dengan menerapkan *good corporate govenance* dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan rasio keuangan menemukan hasil bahwa tingkat profitabilitas, share marked, likuiditas, dan struktur modal perusahaan malaysia meningkat setelah terjadinya perubahan tata kelola perusahaan. Sementara Surya dan Ivan Yustiavandana dalam Ibadil M. (2013) memberikan pendapat bahwa *Good Corporate governance* merupakan mekanisme untuk mengatur dan mengelola bisnis, serta untuk meningkatkan kemakmuran perusahaan. Tujuan utama *good corporate governance* adalah untuk meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Sehingga hipotesis penelitian berikutnya yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

- H₃** : Terdapat Perbedaan Signifikant *Current Ratio* (CR) sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013; dan
- H₄** : Terdapat Perbedaan Signifikan *Quick Ratio* (QR) sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013

Widianto (2011) meneliti perbedaan karakteristik-karakteristik perusahaan dan pelaksanaan corporate governance yang terdapat pada perusahaan-perusahaan yang melakukan pengungkapan sustainability report dengan perusahaan yang tidak melakukan Pengungkapan, serta pengaruh variabel-variabel karakteristik perusahaan dan pelaksanaan corporate governance terhadap praktik pengungkapan sustainability report pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan karakteristik-karakteristik perusahaan dan pelaksanaan *corporate governance* antara perusahaan yang melakukan pengungkapan dan tidak melakukan pengungkapan, sedangkan tidak terjadinya perbedaan yang signifikan pada variabel *leverage*. Hasil penelitian Supatmi (2007) juga menunjukkan bahwa corporate governance ditemukan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kinerja keuangan yang diproksi dengan leverage ratio, Ini berarti bahwa skor *corporate govenance* yang tinggi belum tentu didukung oleh kemampuan perusahaan dalam mendanai usahanya dari berhutang. Hipotesis ke tiga dalam penelitian ini di tuliskan , sebagai berikut:

- H₅** : Terdapat Perbedaan Signifikan *Debt Ratio* (DT) Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013; dan
- H₆** : Terdapat Perbedaan Signifikan *Debt To EquityRatio* (DT) Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013;

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan milik negara selama periode 2012-2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan termasuk dalam kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN), (2) Listing pada Bursa Efek Indonesia, (3) Secara langsung dimiliki oleh pemerintah, (4) Bukan termasuk perusahaan yang bergerak bidang jasa keuangan/Perbankan, dan (5) Tersedianya laporan keuangan tahunan pada tahun 2012 - 2014.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Regulasi Pemerintah

Pengertian Regulasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, Regulasi sosial (misalnya norma), co-regulasi dan pasar. Regulasi berasal dari bahasa Inggris, yakni *regulation*, pada kamus besar bahasa Indonesia regulasi berarti peraturan, kata peraturan "peraturan" mengandung arti kaidah yang di buat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan, dan ketentuan yang harus dijalankan atau di patuhi. Jadi, regulasi pemerintah adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi pemerintah (Bastian. 2010)

Peran Kementerian BUMN sebagai institusi pembina BUMN adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah yang bertugas dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembinaan, serta regulator kepada Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, Surat edaran Menteri Negara BUMN nomor SE-05/MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih merupakan salah satu bentuk regulasi pemerintah yang bertujuan mewujudkan BUMN yang tangguh (profesional dan tahan goncangan /godaan), unggul (mengutamakan sistem, mutu, dan inovasi) serta bermartabat (bersih dari segala bentuk penyimpangan dan kecurangan termasuk korupsi).

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah refleksi kinerja perusahaan yang diukur dengan data yang berasal laporan keuangan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini *diproxy* dengan menggunakan rasio keuangan, dan diukur dengan rasio, adapun rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Rasio *profitabilitas* yang terdiri dari;

- (1) *Return On Investment (ROI)*, dengan rumus:

$$ROI = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

(2) *Net Profit Margin (NPM)*, dengan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

Rasio Likuiditas yang terdiri dari;

(3) *Current Ratio (CR)*, dengan rumus;

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

(4) *Quick Ratio (QR)*, dengan rumus;

$$\text{Quick ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar-persediaan}}{\text{Utang lancar}}$$

Rasio Leverage yang Terdiri dari;

(5) *Debt Ratio (DT)*, dengan rumus;

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

(6) *Debt To Equity Ratio (DTE)*, dengan rumus:

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Toatal Hutang}}{\text{Modal (equity)}}$$

Pengujian Hipotesis

Hipotesis penelitian akan diuji dengan menggunakan alat uji beda dua rata-rata observasi berpasangan (*paired two sampel for means*) dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2013, Hipotesis 1 dan 2 akan digunakan untuk mengetahui apakah Rasio Profitabilitas memiliki perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah implementasi Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013 Tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih.

Hipotesis 3 dan 4 digunakan untuk mengetahui apakah Rasio Likuiditas memiliki perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah implementasi Surat Edaran Kementerian

BUMN Nomor 05/MBU/2013 Tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih, dan Hipotesis 5 dan 6 digunakan untuk mengetahui apakah Rasio Solvabilitas/Leverage memiliki perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah implementasi Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013 Tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif rasio profitabilitas yaitu ROI dan NPM sebelum, ROI dan NPM Setelah, untuk 14 sampel perusahaan yang terpilih.

Tabel 1
Statistik Deskriptif Rasio Profitabilitas

ROI Th. 2012 (Sebelum)		ROI Th. 2014 (Setelah)		NPM Th. 2012 (Sebelum)		NPM Th. 2014 (Setelah)	
Mean	0,18538	Mean	0,06111	Mean	0,13132	Mean	0,06960
Standard Error	0,02942	Standard Error	0,04945	Standard Error	0,03244	Standard Error	0,02978
Median	0,18007	Median	0,11006	Median	0,05453	Median	0,05628
Mode	#N/A	Mode	#N/A	Mode	#N/A	Mode	#N/A
Standard Deviation	0,11010	Standard Deviation	0,18501	Standard Deviation	0,12140	Standard Deviation	0,11142
Sample Variance	0,01212	Sample Variance	0,03423	Sample Variance	0,01474	Sample Variance	0,01241
Kurtosis	-0,12313	Kurtosis	1,87903	Kurtosis	-1,30810	Kurtosis	-0,99654
Skewness	0,14156	Skewness	-1,33970	Skewness	0,59125	Skewness	-0,01526
Range	0,40621	Range	0,65478	Range	0,36378	Range	0,33366
Minimum	-0,01753	Minimum	-0,40577	Minimum	-0,00855	Minimum	-0,09457
Maximum	0,38868	Maximum	0,24901	Maximum	0,35523	Maximum	0,23910
Sum	2,59529	Sum	0,85557	Sum	1,83854	Sum	0,97441
Count	14	Count	14	Count	14	Count	14
Confidence Level(95,0%)	0,06357	Confidence Level(95,0%)	0,10682	Confidence Level(95,0%)	0,07009	Confidence Level(95,0%)	0,06433

Sumber: Data diolah

Nilai rata - rata ROI sebelum implementasi surat Surat Edaran Kementerian Negara BUMN Nomor 05/MBU/2013 Tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih sebesar 18,5 %, dan ROI setelah implementasi Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013 Tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih sebesar 6%, secara rata-rata terjadi penurunan ROI sebesar 12,5%, Nilai tengah (median) dari 14 sampel perusahaan menunjukkan nilai tengah ROI sebelum implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 sebesar 18% lebih besar dibandingkan nilai tengah ROI setelah implementasi Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013 Tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih yaitu sebesar 11%, rasio ROI mengalami penurunan sebesar 7%.

Nilai minimum ROI sebelum implementasi -1% lebih besar, dibandingkan dengan nilai minimum ROI setelah implentasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013, yaitu sebesar -40% selisih sebesar -39%. Nilai maximum ROI sebelum implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 sebesar 38%, sedangkan nilai maximum ROI setelah implemntasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 sebesar 25% terjadi penurunan sebesar 13%. Nilai total ROI 14 sampel perusahaan sebelum implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 sebesar 260% lebih besar 175% di banding ROI setelah perusahaan mengimplementasikan SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 yaitu sebesar 85%.

Nilai Rata-Rata (*Mean*) NPM 14 sampel perusahaan sebelum SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 dalam Tabel 1 sebesar 13%, sedangkan rata-rata rasio NPM setelah implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 sebesar 7%, terjadi penurunan rasio NPM setelah perusahaan melakukan penerapan SE BUMN Nomor 05/MBU/2013. Nilai median NPM 14 perusahaan sampel menunjukkan nilai yang sama yaitu 5%, sebelum 14 perusahaan sampel melakukan pemberlakuan SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 maupun setelah melakukan pemberlakuan.

Nilai minimum NPM sebelum pemberlakuan SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 sebesar -8%, sementara setelah adanya pemberlakuan SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 nilai minimum sebesar -9%, turun sebesar 1%. Nilai Maximum sebelum pemberlakuan SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 sebesar 35%, sedangkan nilai maximum setelah pemberlakuan SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 sebesar 24%, terjadi penurunan rasio NPM sebesar 11%. Secara total (SUM) rasio NPM sebelum implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 183%, sedangkan rasio NPM setelah implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 sebesar 97%, nilai NPM turun sebesar 83% setelah implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013.

Tabel 2 merupakan gambaran rasio likuiditas (CR dan QR) 14 perusahaan sampel, nilai Rata-rata *Curent Ratio* (CR) sebelum implementasi dan setelah implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 sebesar 200% lebih besar di dibandingkan dengan nilai CR setelah implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 yaitu 137% selisih penurunan rasio sebesar 63 %. Sedangkan nilai median sebelum implementasi juga lebih besar 152% di dibandingkan dengan nilai median setelah implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 yaitu 132 % terpaut selisih angka sebesar 20% dari nilai median sebelum implementasi.

Tabel 2
Statistik Deskriptif Rasio Likuiditas

<i>CR Th. 2012</i> (<i>Sebelum</i>)		<i>CR Th. 2014 (Setelah)</i>		<i>QR Th. 2012</i> (<i>Sebelum</i>)		<i>QR Th. 2014</i> (<i>Setelah</i>)	
Mean	2,04854	Mean	1,37251	Mean	1,38157	Mean	0,76944
Standard Error	0,39070	Standard Error	0,15745	Standard Error	0,32919	Standard Error	0,10953
Median	1,52599	Median	1,32256	Median	1,07362	Median	0,57252
Mode	#N/A	Mode	#N/A	Mode	#N/A	Mode	#N/A
Standard Deviation	1,46186	Standard Deviation	0,58912	Standard Deviation	1,23170	Standard Deviation	0,40981
Sample Variance	2,13704	Sample Variance	0,34707	Sample Variance	1,51710	Sample Variance	0,16794
Kurtosis	-0,51341	Kurtosis	-1,03662	Kurtosis	2,26758	Kurtosis	-0,25597
Skewness	0,86909	Skewness	0,35662	Skewness	1,76448	Skewness	1,01170
Range	4,41599	Range	1,81486	Range	3,85929	Range	1,23383
Minimum	0,50776	Minimum	0,57213	Minimum	0,42916	Minimum	0,36558
Maximum	4,92374	Maximum	2,38699	Maximum	4,28845	Maximum	1,59942
Sum	28,67953	Sum	19,21516	Sum	19,34198	Sum	10,77218
Count	14	Count	14	Count	14	Count	14
Confidence Level(95,0%)	0,84405	Confidence Level(95,0%)	0,34015	Confidence Level(95,0%)	0,71117	Confidence Level(95,0%)	0,23662

Sumber: Data diolah

Nilai minimum CR sebesar 50% lebih kecil dibanding nilai CR setelah implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 yaitu sebesar 57 % terpaut selisih 7%, sedangkan nilai maximum CR sebelum implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 sebesar 49% lebih besar di bandingkan nilai maximum sebelum implementasi yaitu 24% penurunan sebesar 25%. Secara jumlah total nilai CR sebelum implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 lebih tinggi dengan nilai 290% bila di bandingkan nilai CR setelah implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 dengan nilai 192%, terjadi penurunan 98%.

Nilai rata-rata QR sebelum implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 turun sebesar 62% setelah implementasi, dari nilai 138% sebelum implementasi, dibanding dengan nilai rata-rata QR setelah implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013, yaitu hanya 72%. Nilai median QR sebelum implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 sebesar 100%, sedangkan nilai median CR setelah sebesar 57%, selisih penurunan sebesar 43%. Nilai minimum CR sebelum implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 lebih besar, dengan nilai 43% selisih penurunan sebesar 7% dari nilai minimum CR setelah implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013, dengan nilai 36%. Sedangkan nilai maksimum CR sebelum implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013, sebesar 420% selisih dan terjadi penurunan sebesar 250% di banding nilai maksimum sebelum implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 yaitu 160%. Nilai total sebelum implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 lebih besar dengan nilai 1934%, sedangkan nilai total CR sebelum implementasi sebesar 1077% selisih penurunan angka sebesar 857%.

Tabel 3 menggambarkan Rasio Leverage/Solvabilitas 14 Perusahaan Sampel, Rata-rata *debt Ratio* (DT) sebelum implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 lebih tinggi di bandingkan rasio DT setelah melakukan implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013, besaran rata-rata DT rasio sebesar 73% lebih besar 22% dibandingkan dengan rasio DT sebelum perusahaan melakukan implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013, yaitu sebesar 51%.

Tabel 3
Statistik Deskriptif Rasio Leverage/Solvabilitas

DT Th. 2012 (Sebelum)		DT Th. 2014 (Setelah)		DTE Th. 2012 (Sebelum)		DTE Th. 2014 (Setelah)	
Mean	0,73285	Mean	0,51698	Mean	1,65967	Mean	1,63228
Standard Error	0,17236	Standard Error	0,06105	Standard Error	0,42816	Standard Error	0,43514
Median	0,50513	Median	0,49232	Median	1,04337	Median	0,97834
Mode	#N/A	Mode	#N/A	Mode	#N/A	Mode	#N/A
Standard Deviation	0,64490	Standard Deviation	0,22841	Standard Deviation	1,60203	Standard Deviation	1,62813
Sample Variance	0,41589	Sample Variance	0,05217	Sample Variance	2,56650	Sample Variance	2,65082
Kurtosis	4,26475	Kurtosis	0,48062	Kurtosis	1,94818	Kurtosis	1,20626
Skewness	2,12338	Skewness	0,56544	Skewness	1,56515	Skewness	1,38870
Range	2,26305	Range	0,83146	Range	5,32759	Range	5,10265
Minimum	0,25288	Minimum	0,00496	Minimum	0,33847	Minimum	0,01041
Maximum	2,51592	Maximum	0,83642	Maximum	5,66606	Maximum	5,11306
Sum	10,25987	Sum	7,23768	Sum	23,23544	Sum	22,85193
Count	14	Count	14	Count	14	Count	14
Confidence Level(95,0%)	0,37235	Confidence Level(95,0%)	0,13188	Confidence Level(95,0%)	0,92498	Confidence Level(95,0%)	0,94006

Sumber: Data diolah

Nilai median DT sebelum implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 masih lebih besar yaitu 50%, dibandingkan nilai median DT setelah implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 maka nilai median DT sebelum selisih sebesar 1% karena nilai median DT setelah implementasi sebesar 49%. Nilai minimum DT sebelum implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 lebih besar 25% di bandingkan dengan DT sebelum implementasi yaitu sebesar 0%, sedangkan nilai maksimum DT sebelum implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 juga masih lebih besar yaitu 251%, di bandingkan dengan nilai DT setelah perusahaan melakukan implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 yaitu sebesar 83 %. Nilai total DT sebelum juga lebih besar dengan selisih hilai sebesar 300% di bandingkan dengan nilai DT setelah implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013, masing-masing nilai total DT sebelum sebesar 1025% dibanding nilai total DT setelah yaitu sebesar 723%.

Nilai rata-rata DTE dari 14 sampel, sebelum implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 sebesar 165%, sedangkan setelah implementasi nilai DTE menurun menjadi 163%, terjadi penurunan DTE sebesar 2%, dari segi median data, 14 sampel perusahaan menunjukkan nilai DTE 104% ketika perusahaan melakukan implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013, menjadi 97% terjadi penurunan sebesar 7%.

Nilai minimum rasio DTE juga terjadi penurunan, sebelum perusahaan melakukan implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 nilai DTE sebesar 33%, setelah perusahaan melakukan implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 nilai DTE turun sebesar 32%, nilai penurunan DTE setelah implementasi sebesar 1%. Nilai maksimum DTE sebelum implementasi SE BUMN Nomor 05/MBU/2013 sebesar 566% setelah perusahaan sampel melakukan implementasi nilai DTE menjadi 511%, terjadi penurunan sebesar 55%. Nilai total DTE sebelum implementasi 2323%, sedangkan sebelum implementasi 2285%, terjadi penurunan nilai total DTE sebesar 38%.

Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis 1

Tabel 4 digunakan untuk menjawab hipotesis 1, untuk mengetahui perbedaan rasio *Return On Investment (ROI)* perusahaan sebelum dan setelah implementasi Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013 Tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih.

Tabel 4

Hasil Uji t : *Paired Two Sample for Means Rasio Return On Investment*

	<i>ROI Th. 2012 (Sebelum)</i>	<i>ROI Th. 2014 (Setelah)</i>
Mean	0,185377835	0,061112369
Variance	0,012121351	0,034228401
Observations	14	14
Pearson Correlation	0,491344356	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	13	
t Stat	2,865239624	
P(T<=t) one-tail	0,006631834	
t Critical one-tail	1,770933396	
P(T<=t) two-tail	0,013263668	
t Critical two-tail	2,160368656	

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil Uji t (*paired Two Sampel For Means*) menunjukkan nilai t Stat (T Hitung) sebesar 2,865 dan sedangkan nilai t *Critical two tail* (T Tabel) sebesar 2,160 dengan nilai P value sebesar 0,013 lebih kecil dari alfa 5%, maka hipotesis H_1 Diterima. Terdapat Perbedaan Return On Investment Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013.

Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ho *et,al* (2012) yang memberikan hasil tingkat *profitabilitas, share marked, likuiditas, dan struktur modal* perusahaan malaysia meningkat setelah terjadinya perubahan tatakelola perusahaan, dikarenakan perbedaan metodologi penelitian dan jumlah sampel yang digunakan peneliti. Peningkatan profitabilitas perusahaan setelah penerapan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013 atau *Good Corporate Governance* akan bersifat jangka panjang, sementara dalam penelitian ini hanya menggunakan jendela 1 (satu) tahun sebelum penerapan dan satu tahun setelah penerapan.

Pengujian Hipotesis 2

Tabel 5 merupakan pengujian terhadap *Net Profit Margin (NPM)*, NPM salah satu ukuran dalam Rasio Profitabilitas. Peneliti akan melakukan pengujian terhadap rasio *Net Profit Margin (NPM)*, yang menyatakan Terdapat Perbedaan *Net Profit Margin (NPM)* Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013.

Tabel 5
Hasil Uji t : Paired Two Sample for Means Rasio Net Profit Margin

	<i>NPM Th. 2012 (Sebelum)</i>	<i>NPM Th. 2014 (Setelah)</i>
Mean	0,131324516	0,069600819
Variance	0,014737467	0,012414631
Observations	14	14
Pearson Correlation	0,612073865	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	13	
t Stat	2,24381634	
P(T<=t) one-tail	0,021447111	
t Critical one-tail	1,770933396	
P(T<=t) two-tail	0,042894222	
t Critical two-tail	2,160368656	

Sumber: Data diolah

Hasil pengujian menunjukkan nilai t Stat (T Hitung) sebesar 2,243 dan sedangkan nilai t *Critical two tail* (T Tabel) sebesar 2,160 dengan nilai P value sebesar 0,042 lebih kecil dari alfa 5%, maka hipotesis H_1 Diterima. Terdapat Perbedaan *Net Profit Margin* (NPM) Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013.

Hasil pengujian *paired Two Sampel For Means* untuk dua rasio profitabilitas (ROI dan NPM) adalah terdapat perbedaan yang signifikan Rasio *Profitabilitas* Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013, perbedaan signifikan dalam pengujian ini hanya dilihat dari perubahan rasio profitabilitas selama satu tahun sebelum dan satu tahun setelah yang kecenderungan perubahannya bukan peningkatan profitabilitas melainkan penurunan profitabilitas setelah perusahaan mengimplementasikan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013.

Pengujian Hipotesis 3

Tabel 6 merupakan hasil pengujian terhadap *Current Ratio* (CR) sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013.

Tabel 6
Hasil Uji t : Paired Two Sample for Means Current Ratio (CR)

	<i>CR Th. 2012 (Sebelum)</i>	<i>CR Th. 2014 (Setelah)</i>
Mean	2,048537705	1,372511214
Variance	2,137039305	0,347066424
Observations	14	14
Pearson Correlation	0,40870234	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	13	
t Stat	1,895833919	
P(T<=t) one-tail	0,040214969	
t Critical one-tail	1,770933396	
P(T<=t) two-tail	0,080429937	
t Critical two-tail	2,160368656	

Sumber: Data diolah

Hasil pengujian diatas menunjukkan nilai t Stat sebesar 1.895 dan nilai t Critical two-tail sebesar 2,160, dengan nilai P value sebesar 0.080 lebih besar dari alfa sebesar 5%, maka dapat disimpulkan hipotesis H₃ dapat ditolak yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan *Current Ratio (CR)* Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013. Hasil pengujian ini mendukung penelitian yang dilakukan Ibrahim *et,al* (2007) yang menyimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara pengungkapan tata kelola perusahaan dan rasio neraca (*Current ratio, Long-term Liabilities to Total Assets Ratio, Total Debt to Total Assets Ratio, Total Equity to Total Assets Ratio, dan Share Capital to Total Asset Ratio*), walaupun dengan metodologi yang berbeda, karena *person corelation* yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0.408 tidak mendekati 1 (satu) artinya berkorelasi lemah. Hasil dari korelasi yang lemah bisa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu penggunaan data dalam penelitian ini yang terbatas dan bersifat jangka pendek, sementara dalam penelitian-penelitian sebelumnya terkait implementasi *good corporate governance* data yang digunakan bersifat multi year atau lebih dari 5 (lima) Tahun karena manfaat atau efek *good corporate governance* bersifat jangka panjang.

Pengujian Hipotesis 4

Pengujian Hipotesis 4 (H₄) merupakan pengujian terhadap Quick Ratio (QR), rasio ini merupakan salah satu alat ukur dalam rasio likuiditas yang juga digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hipotesis 4 (H₄) dalam penelitian ini menyatakan Terdapat Perbedaan *Quick Ratio (QR)* Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013, hasil pengujian dari hipotesisi ini disajikan dalam Tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji t : Paired Two Sample for Means Quick Ratio (QR)

	QR Th. 2012 (Sebelum)	QR Th. 2014 (Setelah)
Mean	1,381570083	0,769441103
Variance	1,517097056	0,16794497
Observations	14	14
Pearson Correlation	0,451711086	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	13	
t Stat	2,065982204	
P(T<=t) one-tail	0,029679611	
t Critical one-tail	1,770933396	
P(T<=t) two-tail	0,059359223	
t Critical two-tail	2,160368656	

Sumber: Data diolah

Hasil pengujian Hipotesis 4 (H_4) menunjukkan nilai t Stat sebesar 2.065 dan nilai t Critical two-tail sebesar 2,160, dengan nilai P value sebesar 0.089 lebih besar dari alfa sebesar 5%, maka dapat disimpulkan hipotesis H_4 dalam penelitian ini ditolak yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan *Quick Ratio (QR)* Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013. Hasil pengujian dua pengujian hipotesis 3 dan 4 diatas (CR dan QR) mendukung penelitian yang dilakukan oleh Poh-Ling Ho *et,al* (2012) yang menyimpulkan bahwa tingkat *profitabilitas, share marked, likuiditas*, dan struktur modal perusahaan malaysia meningkat setelah terjadinya perubahan tata kelola perusahaan.

Pengujian Hipotesis 5

Tabel 8 menyajikan hasil uji beda *Debt Ratio* Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013.

Tabel 8
Hasil Uji t : Paired Two Sample for Means Debt Ratio (DT)

	DT Th. 2012 (Sebelum)	DT Th. 2014 (Setelah)
Mean	0,732847874	0,516977329
Variance	0,415892497	0,052170964
Observations	14	14
Pearson Correlation	-0,235211285	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	13	
t Stat	1,101858751	
P(T<=t) one-tail	0,145252691	
t Critical one-tail	1,770933396	
P(T<=t) two-tail	0,290505382	
t Critical two-tail	2,160368656	

Sumber: Data diolah

Hasil pengujian rasio *Debt Ratio* menunjukkan nilai t Stat sebesar 1.101, nilai t *Critical two tail* sebesar 2.160, dan nilai P sebesar 0.290 lebih besar dari nilai alfa sebesar 5%, maka dapat disimpulkan hipotesis H_5 ditolak yang artinya Tidak terdapat perbedaan yang signifikan *Debt Ratio (DT)* Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013.

Pengujian Hipotesis 6

Tabel 9 menyajikan hasil pengujian terhadap Perbedaan *Debt To Equity Ratio (DTE)* Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013.

Tabel 9
Hasil Uji t : Paired Two Sample for Means Debt To Equity Ratio (DTE)

	<i>DTE Th. 2012 (Sebelum)</i>	<i>DTE Th. 2014 (Setelah)</i>
Mean	1,659674167	1,63228074
Variance	2,56649695	2,650818565
Observations	14	14
Pearson Correlation	0,902988908	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	13	
t Stat	0,143983355	
P(T<=t) one-tail	0,443860843	
t Critical one-tail	1,770933396	
P(T<=t) two-tail	0,887721686	
t Critical two-tail	2,160368656	

Sumber: Data diolah

Hasil pengujian rasio *Debt To Equity Ratio* menunjukkan nilai t Stat sebesar 0.14, nilai t *Critical two tail* sebesar 2.160, dan nilai P sebesar 0.887 lebih besar dari nilai alfa sebesar 5%, maka dapat disimpulkan hipotesis H_6 ditolak yang artinya Tidak terdapat perbedaan yang signifikan *Debt To Equity Ratio (DT)* Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013. Hasil pengujian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Supatmi (2007) yang berkesimpulan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kinerja keuangan yang diproksi dengan leverage ratio.

Dari enam hipotesis yang diuji dalam penelitian, keseluruhan hasil uji penelitian akan disajikan dalam Tabel 10, sebagai berikut;

Tabel 10
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

NO	HIPOTESIS	HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS
1.	Hipotesis 1 (Pengujian Terhadap ROI 14 Perusahaan Sampel)	Terdapat Perbedaan Signifikan
2.	Hipotesis 2 (Pengujian Terhadap NPM 14 Perusahaan Sampel)	Terdapat Perbedaan Signifikan
3.	Hipotesis 3 (Pengujian Terhadap CR 14 Perusahaan Sampel)	Tidak Terdapat Perbedaan Signifikan
4.	Hipotesis 1 (Pengujian Terhadap QR 14 Perusahaan Sampel)	Tidak Terdapat Perbedaan Signifikan
5.	Hipotesis 1 (Pengujian Terhadap DT 14 Perusahaan Sampel)	Tidak Terdapat Perbedaan Signifikan
6.	Hipotesis 1 (Pengujian Terhadap DTE 14 Perusahaan Sampel)	Tidak Terdapat Perbedaan Signifikan

Sumber: Data diolah

Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa regulasi pemerintah terkait penegakan pilar-pilar *Good Corporate Governance* yaitu: *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness* pada tiap jenjang jabatan yang ada dalam BUMN, dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, karena regulasi yang timbul akan merubah sistem perusahaan secara langsung, dan perubahan sistem dalam perusahaan akan sangat mempengaruhi struktur keuangan perusahaan akibatnya akan berpengaruh terhadap capaian kinerja perusahaan tersebut, tetapi regulasi yang diatur pemerintah dalam hal ini penerapan *Good Corporate Governance* memiliki efek positif jangka panjang, misal nilai perusahaan dimasa mendatang akan semakin tinggi dan perusahaan akan menjadi semakin kredibel dalam pandangan pemerintah dan masyarakat.

SIMPULAN DAN KETERBATASAN

Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) *Return On Investment* (ROI) Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013 Tentang *Road Map* Menuju BUMN Bersih terbukti memiliki perbedaan yang signifikan, (2) *Net Profit Margin* (NPM) Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013 Tentang *Road Map* Menuju BUMN Bersih terbukti memiliki perbedaan yang signifikan, (3) *Current Ratio* (CR) sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013 Tentang *Road Map* Menuju BUMN Bersih terbukti tidak memiliki perbedaan yang signifikan, (4) *Quick Ratio* (QR) sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013 Tentang *Road Map* Menuju BUMN Bersih terbukti tidak memiliki perbedaan yang signifikan, (5) *Debt Ratio* (DT) sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013 Tentang *Road Map* Menuju BUMN Bersih tidak terbukti memiliki perbedaan yang signifikan, dan (6) *Debt To Equity Ratio* (DTE)

sebelum dan Setelah Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 05/MBU/2013 Tentang *Road Map* Menuju BUMN Bersih tidak terbukti memiliki perbedaan yang signifikan.

Keterbatasan

Keterbatasan utama yang terdapat dalam penelitian ini adalah penggunaan sampel perusahaan yang tergolong masih minim yaitu sebanyak 14 Perusahaan dari 119 Perusahaan, dan jumlah series tahun yang di gunakan yaitu 1 (satu) tahun sebelum dan 1 (satu) tahun setelah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnesia, S. 2012. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan (Rasio Market Measure) Sebelum Dan Sesudah Penerapan Good Corporate Governance. *Skripsi* Universitas Gunadarma. Jakarta.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Edisi pertama. Penerbit Erlangga.
- Bhagat, S. dan B. Bolton. 2009. Corporate Governance and Firm Performance: Recent Evidence. *www.econ.upf.edu*. Diakses tanggal 21 Maret 2015.
- Harahap, S. S., 2010. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Edisi 6 PT Raja Grafindo Jakarta.
- Ho, P., N. Aripin, dan G. Tower. 2012. Corporate Governance Failure to Influence the Communication of Key Financial Data over Turbulent Times. *JAMAR*. 10 (1): 35 -52.
- Ibadil, M. 2013. Analisis Pengaruh Risiko, Tingkat Efisiensi, Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Pendekatan Beberapa Komponen Metode Risk Based Bank Rating SEBI 13/24/DPNP/2011) (Studi Kasus Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di BEI Periode 2008-2012). *Skripsi* Universitas Diponegoro. Semarang.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia.
- Ibrahim, S., N. Syed, H. M. Arif, and H. Paino. 2007. The Relationship between Corporate Governance Disclosures and Balance Sheet Ratios. *Gading Business and Management Journal* 11 (2): 33 - 40.
- Peraturan Menteri Negara BUMN nomor 01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- Supatmi. 2007. Corporate Governance dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 14: 183 - 192.
- Surat Edaran Menteri Negara BUMN nomor SE-05/MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih.
- Undang - Undang Dasar 1945 pasal 33.
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Widianto, H. S., 2011. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Ukuran Perusahaan, Dan Corporate Governance Terhadap Praktik

Pengungkapan Sustainability Report (Studi Pada Perusahaan – Perusahaan yang Listed (Go-Public) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007 - 2009). *Skripsi* Universitas Diponegoro. Semarang.

